

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Karya

Sulitnya mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau secara spesifik autisme di Indonesia adalah suatu isu yang perlu lebih disadari dan dipahami oleh masyarakat. Namun, sebelum masuk kepada isu autisme secara spesifik, kita juga harus memahami keadaan di Indonesia mengenai penyandang disabilitas secara keseluruhan. Secara umum, Kementerian Koordinator Bidang Kemanusiaan dan Kebudayaan Republik Indonesia mencatat sebanyak 22,97 juta orang penyandang disabilitas di Indonesia atau sekitar 8,5 persen dari total populasi pada tahun 2023 (Kemenko PMK, 2023). Sayangnya, penulis mengalami kesulitan untuk menemukan laporan resmi atau *dataset* pemerintahan yang membahas persebaran penyandang disabilitas berdasarkan usia untuk melihat persentase penyandang disabilitas anak. Dalam artikel yang dipublikasikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), disebutkan bahwa Survei Kesejahteraan Indonesia (SKI) tahun 2024 mencatat sebanyak 1 juta anak penyandang disabilitas (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2025). Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, penulis tidak dapat menemukan angka ini disebutkan secara spesifik dalam portal BPS atau pun survei yang dimaksud. Salah satu kemungkinan yang terjadi adalah penyebutan jumlah satu juta anak penyandang disabilitas didasari pada data internal SKI tetapi data tersebut belum dipublikasikan secara terbuka sehingga tidak dapat dipastikan kredibilitasnya oleh publik. Selain itu, sampai pada saat karya ini ditulis, BPS belum mempunyai data jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya secara spesifik seperti autisme, *down syndrome*, tuna rungu, tuna wicara, dan lainnya.

Disamping besarnya angka penyandang disabilitas di Indonesia, angka anak dengan autisme juga terus bertambah (Stefanni, 2024). Wakil Menteri Kesehatan RI periode 2020-2024, dr Dante Saksono Harbuwono, pada acara Special Kids Expo tahun 2024 menyatakan bahwa ada sekitar 2,4 juta anak di Indonesia yang

mengidap autisme dan jumlah ini dikatakan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini pun, penulis melihat adanya inkonsistensi data. KPAI menyebutkan Indonesia memiliki satu juta anak penyandang disabilitas, sedangkan Wakil Menteri Kesehatan RI menyebutkan bahwa anak dengan autisme sendiri sudah berjumlah lebih dari dua juta dan jumlah tersebut belum termasuk disabilitas intelektual dan juga disabilitas fisik lainnya. Inkonsistensi ini mungkin disebabkan oleh perbedaan definisi usia anak yang diambil. Ditambah lagi, Dr Bernie Endyarni Medise, SpA(K), MPH, seorang dokter spesialis anak juga mengatakan bahwa dari 4,5 juta angka kelahiran di Indonesia, 1 dari 100 anak mengalami *autism spectrum disorder* (ASD) (Stefanni, 2024). Ketiadaan dan inkonsistensi penemuan *dataset* terbuka mengenai penyandang disabilitas di Indonesia secara spesifik ini juga menjadi *concern* tambahan penulis mengenai isu ini. Apabila data yang tepat tidak dimiliki, pembuatan kebijakan dan penyelesaian isu mengenai hal ini akan sulit terwujud.

Crocker dalam ‘*Autism: A Gift That Needs to Be Opened*’ menjelaskan bahwa autisme adalah gangguan perkembangan kompleks yang memengaruhi fungsi otak seseorang, gangguan ini biasanya muncul dalam tiga tahun pertama kehidupan seorang anak dan biasanya terus ada sepanjang hidupnya (Autism Society of Newfoundland & Labrador, 2015). Menurut Suprajitno & Aida (2017), anak yang mengidap autisme adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun dan mengalami keterlambatan perkembangan kompleks dalam melakukan berbagai aktivitas seperti interaksi sosial, emosional, bahasa, kognitif, motorik, dan sensorik. Meskipun demikian, setiap anak dengan sindrom autisme memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing.

Autisme terdiri dari berbagai macam spektrum yang berarti setiap anak memiliki gejala gangguan yang berbeda-beda (Daulay, 2017). Mereka umumnya memiliki tantangan yang serupa terutama dalam mendapatkan dukungan terkait pendidikan, kesehatan mental, pelayanan sosial, atau kesalahpahaman dari orang-orang di sekitar mereka (National Autistic Society, 2020). Mereka juga dihadapkan dengan stigma buruk seperti anak autis adalah beban dan aib sehingga beberapa

orang tua cenderung menyembunyikan anaknya dari masyarakat dan hak-hak mereka sebagai anak seringkali tidak terpenuhi (Riany, Cuskelly, & Meredith, 2016; Sinombor, 2023).

Oleh karena itu, pendidikan bagi anak autis merupakan aspek krusial yang diperlukan untuk menjembatani dan membantu mereka menjalani hidup di kemudian hari (Eren & DiGalbo, 2021). Di beberapa negara, studi telah membuktikan bahwa pendidikan inklusif yang tepat sasaran bagi anak-anak autis dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan mereka. Myklebust (2007) meneliti dampak dari pendidikan inklusif bagi 494 murid berkebutuhan khusus di sekolah Norwegia, terutama mereka yang memiliki kesulitan belajar, membaca, menulis, berhitung, serta masalah psikososial ringan. Ia menemukan bahwa pendidikan inklusif meningkatkan kemungkinan mereka untuk mendapatkan kualifikasi formal sebesar 76 persen. Selain Norwegia, Finlandia juga merupakan salah satu negara yang berhasil menerapkan sistem edukasi inklusif terutama bagi anak autis (Yulian & Hosein, 2025). Finlandia menggunakan sistem pendidikan inklusif yang holistik dan komprehensif, hal ini berarti kebutuhan dari setiap anak autis diakomodasi secara merata dari segi kebijakan pendidikan hingga praktiknya di sekolah. Finlandia juga berfokus pada pendidikan anak autis yang disertai oleh tenaga pendidik yang sudah mumpuni dan terlatih di bidangnya, infrastruktur sekolah yang memadai, dan memiliki kolaborasi kuat antara guru dengan orang tua. Dengan demikian, anak autis yang menjalankan pendidikan di Finlandia bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan memiliki perkembangan kognitif, motorik, serta sensorik yang lebih baik.

Lantas, bagaimana dengan keadaan pendidikan inklusif di Indonesia? Dilansir dari ANTARA News, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan bahwa hingga September 2023, terdapat 44.477 sekolah yang telah menjadi penyelenggara sekolah inklusi dan 146.205 siswa berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah tersebut (Fauzan, 2023). Meskipun demikian, penulis sekali lagi tidak

menemukan *dataset* atau laporan resmi yang dapat diakses secara publik terkait pernyataan Kemenko PMK sehingga persebaran wilayah sekolah inklusif pun tidak dapat dilihat. Di sisi lain, meskipun jumlah sekolah inklusif terus bertambah dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah sekolah inklusif yang ada belum cukup untuk menampung lebih dari dua juta anak yang memiliki autisme. Ditambah lagi, terdapat beberapa tantangan yang tidak terhindarkan seperti kurangnya edukasi dan kesiapan guru dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus, kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran inklusif, dan rendahnya kesadaran orang tua serta masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (Ramadhana, 2020).

Sejatinya, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang terbuka dan menghargai hak asasi manusia (Khairuddin, 2020). Pendidikan ini tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan atau kelainan yang dimiliki dan bertujuan agar setiap anak bisa mencapai potensi maksimal mereka di lingkungan yang suportif. Hal ini berarti anak-anak yang memiliki disabilitas pun bisa disatukan dalam ranah sekolah. Konsep pendidikan inklusif di Indonesia diatur dalam Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022. Di dalam panduan tersebut, Kemendikbud mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus menjadi beberapa kelompok yaitu peserta didik dengan hambatan fisik motorik, intelektual, majemuk, penglihatan, pendengaran, Autistic Spectrum Disorder (ASD), dan peserta didik dengan kecerdasan istimewa atau berbakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022). Untuk autisme sendiri, panduan ini menegaskan perlunya kurikulum khusus yang dibuat berdasarkan hasil asesmen setiap anak karena anak yang memiliki autisme biasanya mengalami kesulitan untuk mengikuti kurikulum standar yang ada. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas Pasal 12(f) menyatakan bahwa perlu ada penyesuaian akan rasio jumlah guru dengan anak berkebutuhan khusus di dalam kelas, misalnya hanya ada maksimal dua murid berkebutuhan khusus dalam satu kelas. Apabila murid yang ada ditemukan memiliki kebutuhan khusus yang

cukup berat, sekolah dapat menetapkan hanya ada satu anak berkebutuhan khusus di dalam kelas tersebut.

Dengan keadaan pendidikan inklusif di Indonesia, karya ini ditujukan bagi masyarakat umum dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran, empati, dan edukasi masyarakat akan pentingnya pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan autisme atau penyandang disabilitas secara umum. Tanpa edukasi yang tepat, anak-anak ini tidak mendapat kesempatan untuk mempelajari keterampilan sosial yang penting untuk masa depan mereka sehingga dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berkontribusi kepada masyarakat (UNESA, 2025). Pada akhirnya, mereka akan kesulitan untuk mengakses lapangan pekerjaan dan tidak bisa menyumbang potensi produktivitas atau talenta yang dimiliki sehingga pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat pun ikut terdampak (Fajarwati, 2021). Ditambah lagi, edukasi yang tepat bisa mematahkan stigma buruk dan mendorong masyarakat untuk memahami bahwa autisme adalah sebuah spektrum yang luas, setiap individu memiliki kemampuan dan keunikan yang berbeda-beda, serta tidak mendiskriminasi anak autis dari anak-anak lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik, akan tersedia lebih banyak sumber daya manusia untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, jumlah sekolah inklusif bisa bertambah, dan harapannya dapat mengurangi kesulitan orang tua dalam mencari sekolah yang tepat bagi anak-anaknya.

Secara format, karya ini akan dikemas dalam bentuk *website interactive multimedia storytelling*. Pemilihan ini didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, format *interactive multimedia* ditemukan dapat menumbuhkan kreatifitas dan keingintahuan, memiliki stimulus-respons, visualisasi yang relevan terhadap informasi yang disampaikan, dan meningkatkan motivasi pembelajaran bagi sebagian orang (Damar, Cari, & Sarwanto, 2017). Hasil positif penggunaan multimedia interaktif dalam meningkatkan empati dan juga keterlibatan audiens dapat kita lihat dalam studi yang dilakukan oleh Jaafar, Azlan, dan Din (2022) yang berjudul ‘*Accepting autism: An interactive Documentary*’. Setelah menonton dokumenter interaktif tersebut, 95 persen responden sangat setuju bahwa

multimedia interaktif tersebut membantu mereka menerima individu dengan autisme dan 85 persen sangat setuju bahwa mereka menyadari bahwa individu dengan autisme memerlukan kasih sayang dan juga penerimaan dari masyarakat. Jika dibandingkan dengan format lain, media konvensional seperti artikel cenderung kurang memengaruhi empati para pembaca. Salah satu buktinya didapatkan dalam studi Olivier et al. (2019) di mana sebuah kelompok eksperimen berisikan mahasiswa psikologi bermain *serious games* mengenai disabilitas. Mereka yang hanya membaca teks mengenai kasus penyandang disabilitas tidak mengalami perubahan signifikan dalam empati atau sikap terhadap penyandang disabilitas. Sedangkan kelompok yang memainkan *serious games* mengalami peningkatan empati dan penurunan prasangka.

Kedua, Cairncross & Mannion (2001) menjelaskan bahwa multimedia interaktif juga memiliki kelebihan dalam sifat non-linear yang ditawarkan. Sifat ini membuat pengguna memiliki kebebasan dalam menavigasi bagian yang ingin mereka kunjungi dan mengontrol kecepatan navigasi sesuai keinginan masing-masing. Dalam karya penulis, hal ini berarti pembaca bisa memilih untuk membaca *side stories* yang mereka anggap menarik untuk memperkaya konteks dari cerita utama yang dibawakan. Dengan demikian, setiap pembaca akan mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda dan unik dalam mengakses karya ini.

Ketiga, format *interactive multimedia storytelling* cocok untuk *habit* generasi saat ini yang memiliki kebiasaan *scrolling* pada media sosial ataupun *gadget* mereka hingga disebut *scrolling generation* (Ismiati, 2025). Kebiasaan ini membuat generasi sekarang menyukai informasi yang bisa cepat diakses dan memiliki kreativitas digital, suatu kelebihan yang juga ditawarkan oleh format *interactive multimedia storytelling*.

Keempat, berdasarkan diskusi awal yang dilakukan bersama para kepala sekolah dan juga psikolog di sekolah yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, kebanyakan dari mereka tidak menyarankan format dokumenter karena memerlukan pengambilan video yang cukup banyak. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu privasi anak-anak dan juga orang tua yang mungkin belum nyaman

apabila wajah anaknya tersebar luas di media. Oleh karena itu, format foto dan juga ilustrasi dipilih agar privasi dan juga pemilihan elemen foto bisa lebih dikontrol serta dijaga demi kenyamanan bersama.

1.2 Tujuan Karya

Berdasarkan latar belakang dan juga penjelasan yang telah penulis buat, adapun tujuan karya yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan produk jurnalistik *interactive multimedia storytelling* berupa *website* dengan tema sulitnya mengakses pendidikan bagi anak-anak autis dengan durasi akses sekitar 10-20 menit.
2. Mempublikasikan karya jurnalistik yang dibuat secara daring, lewat dua platform yaitu *website* yang akan di-*hosting* secara pribadi oleh penulis dan juga lewat kanal media JEO Kompas, agar bisa diakses oleh masyarakat luas yang memiliki akses terhadap gawai dan juga internet.
3. Mendapatkan target 200 pengunjung bagi *website* yang penulis *hosting* dan 1000 pembaca artikel di media JEO Kompas.

1.3 Kegunaan Karya

Karya *interactive multimedia storytelling* yang dibuat oleh penulis ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat akan keadaan pendidikan inklusif untuk anak-anak autis di Indonesia melalui pengalaman membaca yang menarik dan interaktif.
2. Mendorong empati dan perubahan stigma yang buruk terhadap anak-anak autis di lingkungan sekitar.
3. Menjadi alat advokasi untuk mendorong kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi anak-anak autis.